



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARI DWI DARYATMO**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **208954**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 556 m2/500 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **433.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOTOR, VARIO MATIK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **50.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **436.750.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **2.620.250.000****III. HUTANG** Rp. **155.162.167****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **2.465.087.833**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.